

## Determinan yang Mempengaruhi Keberlanjutan Program Inovasi Kartu Jakarta Pintar (KJP) di DKI Jakarta

Yulia Ratnasari  
Mahasiswa Program Magister Politeknik STIA LAN Jakarta

### Abstract

*This research was conducted to examine the factors that influence the sustainability of the Jakarta Smart Card (KJP) program in DKI Jakarta even though the Regional Head has changed. This research is expected to have a positive impact and can be a reference for other innovation programs in order to continue in the future. This research was designed using a qualitative descriptive approach. Data that can be derived from interviews and other official documents. A qualitative approach is carried out by conducting interviews with key informants selected with certain considerations as well as literature studies. KJP program is an innovation program in an effort to meet the basic needs of the community, especially in the field of education. This program provides the widest possible access to DKI Jakarta residents who are less able to send their children to higher levels of education. The KJP Plus program can actually continue because of several factors, including the resource factor (both HR and financial / financial), external support, and the effects / effects of this KJP program.*

**Keywords:** Innovation program; Meeting the Basic Needs of the Community

### Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) di DKI Jakarta meskipun Kepala Daerah telah berganti. Penelitian ini diharapkan dapat berdampak positif dan dapat menjadi acuan bagi program inovasi-inovasi lainnya agar dapat terus berlanjut di masa yang akan datang. Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang dapat berasal dari hasil wawancara dan dokumen resmi lainnya. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap informan kunci yang dipilih dengan pertimbangan tertentu serta studi literatur. Program KJP merupakan program inovasi dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat khususnya dalam bidang pendidikan. Program ini memberikan akses seluas-luasnya kepada warga DKI Jakarta yang kurang mampu untuk menyekolahkan anak-anak mereka hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Program KJP Plus sejatinya bisa terus berlanjut karena beberapa faktor, antara lain faktor sumber daya (baik SDM maupun finansial/keuangan), adanya dukungan eksternal, dan dampak/efek yang ditimbulkan dari program KJP ini.

**Kata Kunci:** Program inovasi; Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat

### PENDAHULUAN

Dalam rangka mencapai program Wajib Belajar 12 Tahun sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menjamin seluruh warga usia sekolah untuk mendapatkan pelayanan pendidikan minimal sampai jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK/MA dan sederajat) dengan kebijakan sebagai berikut :

- a. Pada jenjang pendidikan dasar seluruh sekolah SD/MI/SMP/ MTs Negeri dan Swasta di Provinsi DKI Jakarta akan memperoleh dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP) sama dengan sekolah negeri, sehingga tercapai Wajib Belajar 9 Tahun tuntas.
- b. Pada jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK/MA dan sederajat) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengalokasikan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) untuk seluruh sekolah negeri dengan penambahan besaran nominal sesuai kebutuhan sekolah standar (reguler).

Melihat masih tingginya angka putus sekolah di DKI Jakarta dan masih sulitnya masyarakat dalam mengakses pendidikan, maka pada tahun 2012 Gubernur Joko Widodo membuat terobosan inovasi dengan memberikan bantuan sosial biaya personal pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui program Kartu Jakarta Pintar yang masuk dalam kelompok belanja tidak langsung berupa dana bantuan sosial. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini sangat besar. Pada Tahun 2015 anggarannya mencapai Rp.2,3 triliun dan pada tahun 2020 ini meningkat menjadi Rp.3,9 triliun.

Penerima dana bantuan Biaya Personal Pendidikan diprioritaskan bagi siswa miskin dan rentan pada Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baik negeri maupun swasta yang memenuhi kriteria yang ditentukan dengan dibiayai penuh dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta. Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar diharapkan mampu menjamin peserta didik dapat melanjutkan pendidikan sampai tamat pendidikan dasar hingga menengah, dan menarik siswa putus sekolah atau siswa yang tidak melanjutkan pendidikan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan.

Selain mendapatkan dana bantuan dengan nominal di atas, pemegang kartu KJP pun mendapatkan manfaat lain yaitu:

1. mendapatkan transportasi gratis TransJakarta dengan menunjukkan KJP, kartu pelajar dan berseragam sekolah;
2. mendapatkan keuntungan gratis masuk ancol dengan menunjukkan KJP, kartu pelajar dan fotocopy Kartu Keluarga;
3. dapat mengikuti program pangan bersubsidi sebesar 30% dengan menunjukkan KJP.

Siswa tidak mampu yang menjadi target secara personal dinyatakan tidak mampu baik secara materi maupun penghasilan orang tuanya yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan. Kebutuhan dasar pendidikan yang dimaksud mencakup: seragam, sepatu, dan tas sekolah, biaya transportasi, makanan serta biaya ekstrakurikuler. Perkembangan jumlah penerima KJP dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Indikator	Tahun		
		2014	2015	2016
1.	Jumlah Penerima KJP Siswa Negeri	422.548	328.183	310.118
2.	Jumlah Penerima KJP Siswa Swasta	150.541	233.225	220.889
3.	Jumlah Penerima KJP	573.089	561.408	531.007

*Sumber: RPJMD DKI Jakarta, 2018-2022*

Jumlah siswa penerima KJP pada 2014 mulai dari tingkat SD hingga SMA mencapai 573.089 siswa, yakni 422.548 atau 73,7 persen siswa sekolah negeri, dan 150.541 atau 26,3 persen siswa sekolah swasta. Selanjutnya, jumlah penerima KJP pada 2015 mengalami penurunan menjadi 561.408 siswa yang terdiri dari 328.183 atau 58,3 persen siswa sekolah negeri, dan 233.225 atau 41,7 persen siswa sekolah swasta. Kemudian, jumlah penerima KJP tahap pertama tahun 2016 mencapai 531.007 siswa, dengan rincian sebanyak 310.118 atau 58,3 persen siswa sekolah negeri serta 220.889 atau 41,7 persen siswa sekolah swasta.

Keberhasilan program KJP yang sangat dirasakan dampaknya oleh masyarakat membuat program ini terus berlanjut hingga masa pemerintahan Gubernur Anies Baswedan. KJP menjadi program unggulan sekaligus ikon baru strategi pembangunan Jakarta yang berpihak pada warga marjinal ibukota. Di masa pemerintahan Gubernur Anies Baswedan, Program KJP ini disempurnakan menjadi KJP Plus. Cakupan

layanan KJP yang sebelumnya hanya menysasar anak usia sekolah yang sudah bersekolah, sedangkan pada KJP Plus diperluas cakupannya:

- a. Penjangkauan anak tidak sekolah atau putus sekolah;
- b. Pemanfaatan KJP Plus tidak hanya di pendidikan formal namun mencakup informal seperti PKBM dan Lembaga kursus keterampilan.;
- c. Penyesuaian satuan biaya;
- d. Memperbaiki proses monitoring transaksi belanja;
- e. Pemberian bantuan tambahan sebagai persiapan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

Gubernur Anies Baswedan menargetkan Pemberian KJP Plus diharapkan dapat meningkatkan capaian APM SD/MI dari 96,15% menjadi 98,1%, APM SMP/MTs dari 84,79% menjadi 94,5%, APM SMA/SMK/MA dari 71,87% menjadi 85,75% pada tahun 2022.

Perbandingan Besaran dana KJP dan KJP Plus yang diterima adalah sebagai berikut:

JENJANG	ALOKASI DANA KJP		TAMBAHAN SPP UNTUK SEKOLAH SWASTA PER BULAN	
	KJP	KJP PLUS	KJP	KJP PLUS
SD/MI/SDLB	Rp. 210.000	Rp. 250.000	Rp.130.000	Rp.130.000
SMP/MTs/SMPLB	Rp.260.000	Rp.300.000	Rp.170.000	Rp.170.000
SMAN/MAN/SMALBN/ SMA/MA/SMALB	Rp.375.000 s.d. Rp.390.000	Rp.420.000	Rp.275.000	Rp.290.000
SMK	Rp.390.000	Rp.450.000	Rp.240.000	Rp.240.000
PKBM	Rp.210.000	Rp.300.000		

Menurut Nurdin (2019) sejak tahun 2012 program KJP menuai pro dan kontra. Dana KJP dinilai sebagai pemborosan dana oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dikarenakan terdapat 9.006 penerima ganda dengan kerugian mencapai Rp.13,34 miliar. Selain itu ditemukan pula penyelewengan dan kejanggalan yang ditemukan berupa berkurangnya besaran anggaran yang diterima oleh siswa dan orang tua karena adanya potongan administrasi. Selain itu penyalahgunaan KJP juga dilakukan oleh para pemegang kartu dengan menukar bantuan dengan hal-hal yang tidak berhubungan dengan tujuan alokasi dana KJP. Terlepas dari pro kontra itu semua, KJP telah memberikan manfaat tidak hanya bagi siswa dan orang tua tetapi juga berdampak positif terhadap peningkatan ekonomi para pedagang. Oleh karena itu program KJP dianggap sebagai bentuk nyata simbiosis mutualisme yang tercipta di Provinsi DKI Jakarta dari sisi pendidikan. Fakta bahwa keterlibatan pemerintah dalam pembiayaan pendidikan merupakan langkah tepat dalam sebuah investasi menuju bangsa yang maju bila dibarengi dengan pengelolaan yang baik dan tepat sasaran.

Apabila merujuk pada studi Glor (2018), terdapat 6 faktor yang mempengaruhi keberlangsungan suatu inovasi dan organisasi yaitu faktor ideologi, politik, ekonomi, dukungan eksternal, sumber daya dan efek yang ditimbulkan. Menurut Glor (2018) faktor ekonomi, sumber daya, efek yang ditimbulkan dan adanya dukungan eksternal menjadi faktor penentu lahir dan bertahannya suatu inovasi dalam sebuah organisasi. Sedangkan faktor ideologi dan politik menjadi faktor penentu berakhirnya sebuah inovasi dan organisasi. Sebagai sebuah inovasi, program KJP ini terbilang sukses karena program ini dapat terus berkelanjutan meskipun secara politik dan sumber daya, kendali kepemimpinan tidak lagi dipegang oleh Gubernur Petahana. Hal inilah

yang membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut faktor determinan lain yang mempengaruhi keberlanjutan program KJP ini. Program KJP ini kemungkinan besar dapat berlanjut karena ada dukungan sumber daya dan efek yang dirasakan sangat bermanfaat bagi masyarakat DKI Jakarta.

Menurut hasil survey dari Populi Center, Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus versi Gubernur Anies Baswedan dianggap lebih baik dibandingkan KJP versi Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dengan hasil 70% masyarakat menyatakan puas dengan konsep KJP Plus saat ini. Pemilihan responden dilakukan secara acak bertingkat dan penyebarannya merata secara proporsional di 5 Kota Administrasi dan 1 Kabupaten Administrasi di DKI Jakarta dengan margin of error sebesar 4% dan tingkat kepercayaan 95%. Deputi Direktur Eksekutif Populi Center Afrimadona menyatakan bahwa responden dibagi menjadi 2 kelompok yakni kelompok eksperimen dan kelompok control. Dalam survey dengan metode eksperimen (menyebut nama Gubernur pemilik kebijakan), 55% masyarakat menyatakan KJP Plus lebih tepat dan 34,3% memilih KJP era Ahok. Sedangkan dalam metode survei kontrol tanpa menyebutkan pemilik kebijakan, masyarakat yang memilih KJP Ahok sebanyak 46% dan KJP Plus Anies sebanyak 45%. KJP dan KJP Plus memiliki perbedaan dalam hal pencairan dana bantuan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, dimana pembaca akan diajak untuk memahami gambaran umum implementasi KJP di DKI Jakarta. Lokus penelitian ini adalah di DKI Jakarta dengan melibatkan beberapa orang informan yang berasal dari unsur sekolah, penerima manfaat KJP dan pengelola program KJP itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini dilakukan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) di DKI Jakarta meskipun Kepala Daerah telah berganti. Penelitian ini diharapkan dapat berdampak positif dan dapat menjadi acuan bagi program inovasi-inovasi lainnya agar dapat terus berlanjut di masa yang akan datang.

## **KAJIAN LITERATUR**

### **Definisi Inovasi**

Inovasi adalah tentang ide-ide, dan transformasi ide-ide tersebut menjadi penciptaan nilai hasil dalam suatu produk, proses dan layanan. Inovasi meliputi ide terobosan yang mengarah pada produk atau layanan baru, dan gagasan tambahan yang meningkatkan jalannya proses yang dilakukan atau produk yang diproduksi. Inovasi adalah tentang penciptaan pengetahuan baru dan penggunaan pengetahuan itu sendiri.

Glor (2018) memandang inovasi sebagai sebuah konsepsi dan implementasi layanan baru yang signifikan. Inovasi itu sendiri adalah suatu ide atau cara untuk memperbaiki atau mereformasi kebijakan pemerintah yang telah ada dan melibatkan pengambilan risiko. Definisi ini berbeda dengan definisi yang dijelaskan oleh Walker (1969) dan Rogers serta Kim (1985) yang membatasi definisi mereka pada bagian pertama dari definisi Glor yaitu "segala sesuatu yang dianggap baru di dalam organisasi". Walker (1969) mendefinisikan inovasi sebagai suatu program atau kebijakan baru yang diadopsi suatu negara, tanpa memperdulikan berapa lama program tersebut akan berjalan atau berapa banyak negara lain yang mengadopsinya. Glor menambahkan kualifikasi pengambilan risiko, penemuan dan adaptasi dini.

Menurut Mulgan dan Albury (2003) dalam Kurteshi (2016), inovasi di sektor publik didefinisikan sebagai penciptaan dan implementasi proses, produk baru, layanan dan metode pengiriman, yang terutama akan berpengaruh pada efisiensi, efektifitas dan kualitas hasil. Inovasi di sektor publik adalah generasi dan

implementasi ide-ide baru, yang mungkin sama sekali berbeda dari apa yang diketahui hingga saat ini (McDonald, 2008 dalam Kurteshi (2016)).

#### 1. Karakteristik Inovasi

Inovasi adalah proses dan cara ia menciptakan perubahan dalam struktur dan fungsi sebuah organisasi dan pemberian layanan yang tidak seragam. Beberapa inovasi sedikit mengalami perubahan fungsi dalam pemberian layanan, sedangkan beberapa inovasi lainnya menggabungkan sepenuhnya konsep baru dalam suatu lembaga publik, sementara lainnya membuat perubahan dalam struktur, proses dan fungsi organisasi. Berdasarkan beberapa survei inovasi yang signifikan di sektor publik menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

#### 2. Tipe-tipe Inovasi dalam Administrasi Publik:

- a. *Institutional Innovations* atau Inovasi Kelembagaan diartikan sebagai adopsi ide atau perilaku yang baru di organisasi. Fokus pada pembaruan institusi dan/atau pendirian institusi baru;
- b. *Organizational Innovations* atau Inovasi Organisasi yang memperkenalkan prosedur kerja baru dan tekniknya dalam administrasi publik. Hal ini didefinisikan sebagai pemanfaatan yang sukses dari suatu proses, program atau produk yang baru bagi suatu organisasi, diperkenalkan sebagai hasil dari keputusan yang dibuat dalam organisasi tersebut. Tipe ini melibatkan penciptaan praktik bisnis atau cara menjalankan organisasi yang baru dan biasanya melibatkan banyak inovasi;
- c. *Process Innovation*, Proses inovasi berfokus pada peningkatan kualitas publik dan penyampaian layanan kepada masyarakat. Tipe ini melibatkan proses implementasi yang baru atau peningkatan secara signifikan terhadap metode produksi atau pelayanan;
- d. *Conceptual Innovation*, berfokus pada pengenalan bentuk-bentuk baru misalnya tata kelola, pembuatan kebijakan yang interaktif, pemerintahan yang melibatkan, reformasi dalam hal anggaran, koneksi horizontal dll.

Pada kenyataannya, inovasi adalah “ide-ide baru di tempat kerja”, maka tidak semua inovasi harus berhasil dilakukan. Inovasi yang berhasil adalah inovasi yang berkelanjutan dan menambah nilai output suatu organisasi. Dengan kata lain inovasi dianggap sukses apabila tercipta dan terimplementasinya proses, produk baru, layanan baru dan metode penyampaian yang menghasilkan peningkatan yang signifikan baik dalam efisiensi, efektivitas maupun kualitas.

#### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Inovasi**

Proses inovasi dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang merangsang kegiatan inovatif berasal dari lingkungan eksternal dan dari internal organisasi itu sendiri. Pada sektor swasta, faktor pendorong inovasi dibagi menjadi 2 kelompok yaitu faktor internal dan eksternal. Sedangkan pada sektor publik, faktor ekonomi, industri, politik, relasi dan faktor personal dapat mempengaruhi inovasi. Oleh karena itu penggerak inovasi dalam sektor publik dibedakan menjadi 3 kelompok faktor yaitu internal, eksternal dan politik.

Faktor internal dalam sektor publik adalah faktor yang muncul di dalam organisasi dan paling sering menjadi masalah internal dalam suatu departemen atau bidang. Manajemen dan kepemimpinan yang baik juga dapat memainkan peran penting dalam mendorong inovasi serta faktor terkait sumber daya manusia termasuk skema pendidikan dan pelatihan untuk pegawai negeri, ketersediaan insentif untuk berinovasi serta manajemen dan kepemimpinan yang baik. Tak terkecuali birokrasi dan struktur serta desain organisasi juga mempengaruhi inovasi di sektor publik. Penggerak eksternal adalah penggerak yang berasal dari lingkungan luar. Faktor-faktor

eksternal termasuk didalamnya adalah kolaborasi antara sektor publik dan swasta, adanya penghargaan untuk inovasi terhadap inisiatif yang ada dalam tiap-tiap unit kerja dan keberadaan prakteknya baik di tingkat nasional maupun internasional yang merangsang perubahan dalam struktur internal baik dalam hal proses, layanan dan mendorongnya menjadi sebuah inovasi. Penggerak Politik adalah mereka yang muncul terutama di lingkungan politik dan berhubungan dengan dukungan politik atau suara yang diperoleh terlihat tampil lebih baik daripada menentang aktor politik yang berkuasa saat itu. Penggerak politik juga mempunyai pengaruh dalam hal penganggaran, mereka lah yang menentukan ketersediaan atau ketidakcukupan sumber dana. Ketersediaan sumber daya keuangan dan alokasi langsung terhadap anggaran untuk kegiatan sektor publik yang inovatif merupakan pendorong politik sebagai persyaratan untuk melakukan pendanaan, memberikan dukungan politik dan perubahan terhadap regulasi (Agolla & Van Lill, 2013, pp. 167–171; Bloch, 2011, pp. 3–4; Rivera León, Simmonds dan Roman, 2012, pp. 16–21 dalam Cankar, 2013).

Menurut Glor (2018) ada 6 faktor yang mempengaruhi keberlangsungan suatu inovasi dan organisasi yaitu faktor ideologi, politik, ekonomi, dukungan eksternal, sumber daya dan efek yang ditimbulkan. Menurut Glor (2018) faktor ekonomi, sumber daya, adanya dukungan eksternal dan “Efek” yang ditimbulkan/dirasakan oleh masyarakat menjadi faktor penentu lahirnya suatu inovasi dalam sebuah organisasi. Sedangkan faktor ideologi dan politik menjadi faktor penentu berakhirnya sebuah inovasi dan organisasi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sumber daya didefinisikan sebagai segala sesuatu (peralatan, sediaan, waktu, tenaga, modal) baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang digunakan untuk mencapai hasil. Dalam penelitiannya Glor (2018) menyatakan bahwa **faktor sumber daya** diukur berdasarkan sumber daya keuangan (anggaran berimbang/defisit, ada tidaknya hutang, adanya pendapatan tak teduga, persaingan dengan program prioritas lain, pendanaan yang tersedia, apakah sumber daya keuangan dipertahankan selama beberapa dekade); dukungan administratif, apakah inovasi tersebut sudah terimplementasi secara penuh, dukungan pegawai (baik di level manager dan/atau level pekerja, bagaimana mereka diperlakukan dan apakah mereka mendapatkan pendanaan untuk pengembangan inovasi yang juga bergantung kepada lamanya pemerintahan seseorang berkuasa).

Efek didefinisikan sebagai suatu akibat, pengaruh maupun kesan yang ditimbulkan pada pikiran penonoton, pendengar, pembaca dan sebagainya (sesudah mendengar, melihat atau merasakan sesuatu. **Faktor “Efek”** yaitu dampak yang ditimbulkan dari adanya inovasi. Faktor ini diukur melalui model program yang ditujukan untuk menambah pendapatan masyarakat miskin, apakah inovasi mampu mengurangi kemiskinan, apakah inovasi memenuhi tujuan mereka dan apakah para pegawai menghormati atau respect terhadap pelanggannya dalam hal ini adalah masyarakat.

**Faktor ekonomi** diukur dengan tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran dan utang pemerintah.

Politik erat kaitannya dengan segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya) yang berkaitan dengan pemerintahan negara atau terhadap negara lain. **Faktor politik** diukur dengan ada tidaknya pengaruh ideologi negara terhadap pemerintah daerah, berapa lama pemerintah berkuasa, rasio waktu berkuasa antara inovasi dan pemerintahan berikutnya, apakah pendanaan tersedia, berapa lama pemerintah mengimplementasikan inovasi tersebut.

**Faktor eksternal** diukur dengan ada tidaknya dukungan partai politik yang berkuasa, platform pemilihan partai politik dan ada tidaknya inovasi serupa yang dilaksanakan atau diadopsi oleh pemerintah daerah lain.

Ideologi erat kaitannya dengan paham, teori, tujuan maupun kumpulan konsep bersistem seseorang atau suatu golongan yang dijadikan asas pendapat serta memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. **Faktor ideologi** adalah faktor yang berasal dari kekuatan partai dalam ideologi kekuasaan dan kekuatan partai yang berasal dari dukungan publik. Keduanya diukur dengan konsistensi federal dari hasil pemilihan di tingkat provinsi. Wright, Erikson dan McIver (1987) dalam Glor (2019) menemukan bahwa survei opini publik adalah cara terbaik untuk mengukur ideologi secara dominan.

#### **Faktor-faktor kondusif yang mendukung Inovasi**

Amabile dkk (1996) dalam Bertucci (2005) mengatakan bahwa semua inovasi dimulai dengan ide-ide kreatif, kreativitas oleh individu maupun tim adalah titik awal sebuah inovasi; yang pertama diperlukan tetapi tidak berlaku untuk kondisi kedua. Meskipun kreativitas adalah bagian integral dari inovasi, kreativitas itu sendiri tidak dapat menjamin inovasi yang sukses karena inovasi adalah proses yang terdiri dari berbagai faktor, maka keberhasilannya tergantung pada faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Peningkatan permintaan dan adanya kesadaran warga negara  
Semakin sadar dan semakin menuntutnya warga negara membuat semakin banyak tekanan pada pelayanan pemerintah itu sendiri. Rakyat pada dasarnya adalah pelanggan negara dan tuntutan mereka untuk peningkatan kualitas pelayanan publik memberi banyak tekanan bagi pemerintah.
- b. Sistem pelayanan sipil yang akomodatif dan fleksibel  
Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa profesionalisme administratif dan sumber daya kelembagaan mempunyai hubungan positif terhadap teradopsinya sebuah inovasi. Jika para pegawai negeri sipil (PNS) punya pandangan yang fleksibel dan bersedia untuk mengubah aturan dan prosedur organisasi yang ada, maka akan lebih banyak ruang untuk berinovasi. Sikap kaku dan ketidakmampuan untuk berfikir “out of the box” menghambat terciptanya sebuah inovasi.
- c. Kapasitas kelembagaan yang kuat untuk menahan perubahan  
Penelitian telah menunjukkan bahwa institusi yang besar dan kaya lebih mungkin untuk memiliki komitmen dan kemampuan untuk mengadopsi dan menerapkan inovasi. Kesuksesan dalam bidang politik dan sistem ekonomi telah menciptakan struktur kelembagaan yang fleksibel dan dapat bertahan dari guncangan dan perubahan yang merupakan bagian dari proses evolusi yang sukses. Namun sistem ini adalah produk dari masa lalu dan tidak ada solusi cepat untuk mendapatkan kelembagaan yang kuat.
- d. Ketersediaan untuk mengubah metode tradisional dalam pengoperasiannya  
Proses inovasi umumnya melibatkan tahapan-tahapan tertentu dimana ide-ide berubah menjadi prototipe yang lebih layak untuk diuji. Hal ini tentunya membutuhkan pemenang yang bersedia untuk menginvestasikan sumber daya dalam mendesain, mengimplementasikan dan mengevaluasi struktur organisasi.
- e. Kehadiran dan kontinuitas sumber daya  
Sumber daya diperlukan untuk menginkubasi, menguji dan mengimplementasikan inovasi. Organisasi yang memiliki kemampuan dan sumber daya kelembagaan yang cenderung lebih berwirausaha. Selain itu perlu adanya kepastian bahwa suatu kebijakan tidak akan diubah dalam semalam dan sumber daya tidak akan ditarik. Hal ini tentunya memainkan peranan penting dalam memungkinkan organisasi untuk mengejar kebijakan inovatif.
- f. Faktor ketahanan pegawai negeri sipil (PNS)  
Jika para PNS tertarik dengan seaneh kebaikan demi kesejahteraan publik, probabilitas dalam skenario seperti itu akan jauh lebih besar. Untuk melakukan inovasi, para PNS tidak harus mematuhi kebijakan Adhocism dan harus memiliki perspektif dan visi yang kuat. Mereka harus ulet untuk menahan segala jenis

tekanan politik dan tidak harus fokus pada tekanan jangka pendek. Sejak munculnya banyak tekanan pada para PNS, akhirnya mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk berurusan dengan tekanan tersebut setiap harinya dan harus melaporkannya kepada politisi sehingga mereka hanya memiliki sedikit waktu untuk berinovasi.

g. Kurangnya biaya transaksi

Biaya interaksi dikeluarkan ketika adopsi inovasi memerlukan banyak keterlibatan orang-orang dalam negosiasi dan menempa konsensus di antara para pemangku kepentingan yang berbeda. Ini tentunya memakan waktu dan membutuhkan komitmen serta motivasi untuk mengatasi hambatan tersebut. Melakukan inovasi jauh lebih mudah dilakukan di lingkungan yang tidak memberikan banyak biaya transaksi.

h. Kepemimpinan yang visioner

Inovasi hampir selalu membawa perubahan status quo yang mungkin sangat ditentang oleh berbagai kepentingan. Kepemimpinan yang kuat memotivasi staf untuk menerima tantangan dan menginspirasi rasa tanggung jawab kolektif, mengesampingkan keberatan pribadi. Kepemimpinan yang visioner dan dinamis sangat penting untuk keberhasilan penyelesaian suatu proyek. Untuk “organisasi pembelajar” pemimpin yang berkomitmen penting untuk memimpin organisasi dan membimbing melalui transformasi tahapan dengan sukses.

### **Rintangan dalam Inovasi**

Rintangan dalam inovasi tentunya muncul dari kelompok-kelompok kepentingan yang kuat akibat dari munculnya metode pengoperasian yang baru. Proses redistribusi inovasi mungkin membuat beberapa perubahan yang secara politis memungkinkan adanya penolakan. Bagi kelompok eselon, perlawanan muncul karena mereka dipaksa untuk melepaskan diri dari standar operasional prosedur yang selama ini mereka lakukan. Inovasi untuk meningkatkan kinerja ditantang oleh budaya kelembagaan yang mengakar. Inisiatif dari bawah ke atas menghadapi hambatan tambahan karena kurangnya sumber daya dan dukungan administrasi. Adapun hambatan utama yang diidentifikasi oleh Mulgan dan Albury dalam Bertucci (2005) antara lain:

a. Budaya Penyimpangan Risiko

Melakukan inovasi menurut definisi berarti memperkenalkan konsep baru. Membawa masuk sistem yang belum pernah dicoba sebelumnya dengan elemen risiko yang tidak diketahui. Oleh karena itu faktor risikonya tinggi apabila tidak berhasil, sehingga PNS enggan menempuh jalan yang berisiko tersebut.

b. Adhocism

Inovasi membutuhkan perencanaan, keberlanjutan dan komitmen jangka panjang. Sebagian besar pemerintah berada dibawah tekanan politik dalam membuat kebijakan dan dalam tekanan masyarakat dalam pelaksanaannya. Mereka mendapatkan mandat dari orang-orang yang mengikuti pemilu berikutnya sehingga kebijakan Adhocism ini lebih menarik untuk dilakukan ketimbang merancang kebijakan yang lebih baik dan menghasilkan hasil jangka panjang.

c. Tekanan dalam penyampaian dan adanya beban administrasi

Pegawai negeri sipil (PNS) bertugas dibawah tekanan yang besar dan di bawah anggaran yang ketat. Dalam lingkungan yang seperti ini, mereka hanya memiliki sedikit waktu atau keinginan untuk menyusun dan mengimplementasikan strategi inovatif baru. Oleh karena itu seorang birokrat dibayar jauh lebih sedikit dibandingkan dengan sektor swasta dan ini tentunya menghambat dan mengurangi motivasi mereka.

d. Kurangnya Insentif

Sebagian besar organisasi sektor publik, para pegawainya jarang sekali mendapatkan insentif untuk berpikir “out of the box”. Karyawan tidak didorong atau diberi imbalan karena membawa ide-ide inovatif. Kurangnya mekanisme insentif ini membuat para PNS berusaha mematuhi, mencoba dan menguji hal baru namun tidak mencoba mengubah cara mereka melakukan sesuatu karena jika salah mereka akan mendapati masalah. Namun, bila inovasi berjalan dengan baik dan sukses, mereka tidak mendapatkan apapun.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang dapat berasal dari hasil wawancara dan dokumen resmi lainnya. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap informan kunci yang dipilih dengan pertimbangan tertentu serta studi literatur. Jenis data yang akan dihimpun dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara sedangkan data sekunder didapatkan dari studi literatur.

a. Fokus penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen utama sehingga peneliti memiliki kebebasan untuk menggali informasi dari sumber data sesuai dengan tujuan penelitian yang diinginkan oleh peneliti. Fokus dari penelitian ini adalah untuk menggali faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) di DKI Jakarta.

b. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data ini dapat diperoleh dari hasil wawancara kepada informan sesuai dengan pedoman wawancara yang telah dibuat oleh peneliti. Adapun informan yang akan diwawancarai antara lain:

- a) Perwakilan pihak sekolah (Guru/Operator) KJP di Sekolah
- b) Pengelola Dana Bantuan Sosial KJP di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- c) Perwakilan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta unit Standar Satuan Harga (SSH).
- d) Perwakilan penerima dana bantuan sosial KJP Plus.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini didapat melalui buku tertulis yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku literatur, dokumen dan tulisan yang dianggap relevan dengan maksud dan tujuan penelitian.

c. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2020 dan lokus penelitian dilakukan di Provinsi DKI Jakarta.

d. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memudahkan peneliti memilih metode pengumpulan data yang tepat guna dan hasilnya memudahkan melakukan pengumpulan data dengan wawancara semi terstruktur dan studi dokumentasi. Moleong dalam Mamik (2015:18) mendefinisikan wawancara semi terstruktur atau wawancara tidak berencana sebagai wawancara yang sebelumnya tidak dibekali persiapan penyusunan daftar pertanyaan secara terpola dan sistematis yang mengharuskan dipatuhi pewawancara, tetapi tidak berarti dapat dilakukan dengan asal-asalan. Wawancara ini dibagi dua yaitu *pertama*, wawancara bebas artinya teknik wawancara tidak terikat dengan sistematika daftar pertanyaan tertentu, hanya terarahkan pedoman wawancara sehingga wawancara bebas mengembangkan wawancara. *Kedua*, wawancara

terfokus, meski tidak terikat struktur tetapi arahnya masih terpusat pokok persoalan Pemilihan informan sebagai narasumber didasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan informasi yang lengkap dan akurat.

Studi dokumentasi atau literatur menurut Mamik (2015:115-116) merupakan salah satu sumber yang digunakan untuk penelitian kualitatif, dokumen tersebut antara lain dapat berupa 1) dokumen (buku harian, notula rapat, laporan berkala, jadwal kegiatan, peraturan pemerintah, anggaran dasar, rapor siswa, surat-surat resmi dan lain sebagainya), 2) Foto, dapat mengungkapkan suatu situasi pada detik tertentu sehingga dapat memberikan informasi deskriptif yang berlaku saat itu, 3) bahan statistik, yang digunakan untuk menganalisa data lebih mendalam sesuai kebutuhan peneliti.

e. Analisis Data

Menurut Sugiyono (2014:244) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Dalam pelaksanaan kegiatan analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Miles dan Huberman dalam Silalahi (2012:339-441) menjelaskan ketiga alur tersebut sebagai berikut:

- 1) Reduksi Data, merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi;
- 2) Penyajian Data, yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan;
- 3) Penarikan Kesimpulan. Kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama dia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin begitu seksama dengan peninjauan kembali untuk mengembangkan kesepakatan “intersubjektif”.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bersifat deskriptif karena peneliti harus mendeskripsikan suatu obyek, fenomena, atau setting sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif. Dari 4 (empat) narasumber/informant yang diharapkan dapat memberikan informasi, hanya 1 (satu) narasumber saja yang tidak bersedia memberikan informasi. Penggalan informasi dilakukan dengan wawancara semi terstruktur untuk mendapatkan gambaran tentang apa saja yang membedakan antara program KJP Jokowi-Ahok dan program KJP Anies Baswedan, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberlanjutan program KJP ini meskipun Kepala Daerah telah berganti, kualitas pengelolaan kartu Jakarta Pintar, kendala dan masalah apa saja yang dihadapi dalam implementasi Kartu Jakarta Pintar serta gambaran antusiasme masyarakat terhadap program KJP ini.

### 1. Gambaran Umum Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan KJP Plus

Program KJP Plus merupakan program strategis untuk memberikan akses bagi warga DKI Jakarta dari kalangan masyarakat tidak mampu untuk mengenyam pendidikan minimal sampai dengan tamat SMA/SMK dengan dibiayai penuh dari

dana APBD Provinsi DKI Jakarta. KJP Plus merupakan program peningkatan layanan dan memperluas cakupan dari program sebelumnya Kartu Jakarta Pintar (KJP). Pemberian KJP Plus bertujuan untuk:

- a. Mendukung terselenggaranya wajib belajar 12 (dua belas tahun);
- b. Meningkatkan akses layanan pendidikan secara adil dan merata;
- c. Menjamin kepastian mendapatkan layanan pendidikan;
- d. Meningkatkan kualitas hasil pendidikan;
- e. Menumbuhkan motivasi bagi peserta didik untuk meningkatkan prestasi; dan mendorong anak tidak sekolah agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di satuan pendidikan formal maupun non formal.

Pemberian bantuan KJP Plus utamanya ditujukan pada siswa dari keluarga kurang mampu pada jenjang pendidikan SD sampai dengan SMA/SMK untuk memenuhi kebutuhan biaya pendukung personal dan biaya penyelenggaraan pendidikan serta beberapa fasilitas lainnya seperti pangan murah, gratis Trans Jakarta dan Microbus yang tergabung dalam Jak Lingko, biaya gratis masuk Ancol dll. Selain itu terdapat biaya persiapan masuk Perguruan Tinggi bagi lulusan SMA/SMK yang mendaftar kuliah serta biaya sertifikasi profesi bagi lulusan SMK yang mengikuti ujian sertifikasi profesi. Besaran dana KJP Plus yang diterima oleh siswa lebih besar dari program KJP sebelumnya serta dapat dicairkan secara tunai untuk kebutuhan biaya transportasi dan uang saku.

Program KJP Plus mulai diimplementasikan pada tahun 2018 dengan penerima pada tahap I tahun 2018 sejumlah 805 siswa sedangkan pada tahap II tahun 2018 sejumlah 905.919 siswa dengan total anggaran sekitar 3,9 triliun.

“Tidak ada perbedaan pencairan baik pada era Jokowi-Ahok maupun era Anies. Pencairan dilakukan dalam dua tahap di bulan Mei dan Bulan November. Dokumen yang harus dilampirkan untuk pencairan KJP”:

- a. Surat rekomendasi pencairan bantuan sosial dari Dinas Pendidikan yang dapat didownload by sistem (ehibahbansosdki);
- b. Surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak dan pakta integritas (asli)
- c. Fotokopi Surat Keputusan Penerima Bantuan Sosial;
- d. Rekening koran yang terbaru.

(Ibu R, Staf BPKD Provinsi DKI Jakarta selaku juru bayar).

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019, sebanyak 81% responden tidak mengetahui perbedaan antara program KJP dan KJP Plus. Hanya 19% saja yang tahu perbedaannya. Adapun keunggulan KJP Plus yang dirasakan adalah dananya lebih banyak (30,3%), karena dananya lebih banyak, maka lebih membantu memenuhi kebutuhan sekolah (28,9%). Keunggulan lainnya adalah bisa tarik tunai (23,7%) serta sebanyak 2,6% menjawab bisa digunakan untuk membeli sembako murah.

Hal ini senada dengan penuturan Ibu N penerima KJP terkait perbedaan KJP dan KJP Plus yang menyatakan bahwa KJP Plus bisa digunakan untuk membeli pangan murah. Adapun kekurangan yang ada dalam program KJP Plus dari hasil survei yang dilakukan oleh Dinas Kominfo adalah terkadang lama cairnya (46,7%), tidak bisa ditarik lebih dari Rp.100ribu (13,3%) dan ada yang sebenarnya dinilai mampu tetapi menerima KJP Plus (13,3%).

Dalam hal indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan program KJP Plus, secara umum sudah dinilai baik (indeks 3,12 dari range 1 s.d. 4). Secara umum, responden dari kalangan orang tua memiliki tingkat kepuasan lebih tinggi (indeks 3,23) dibandingkan responden dari kalangan siswa (indeks 2,95).

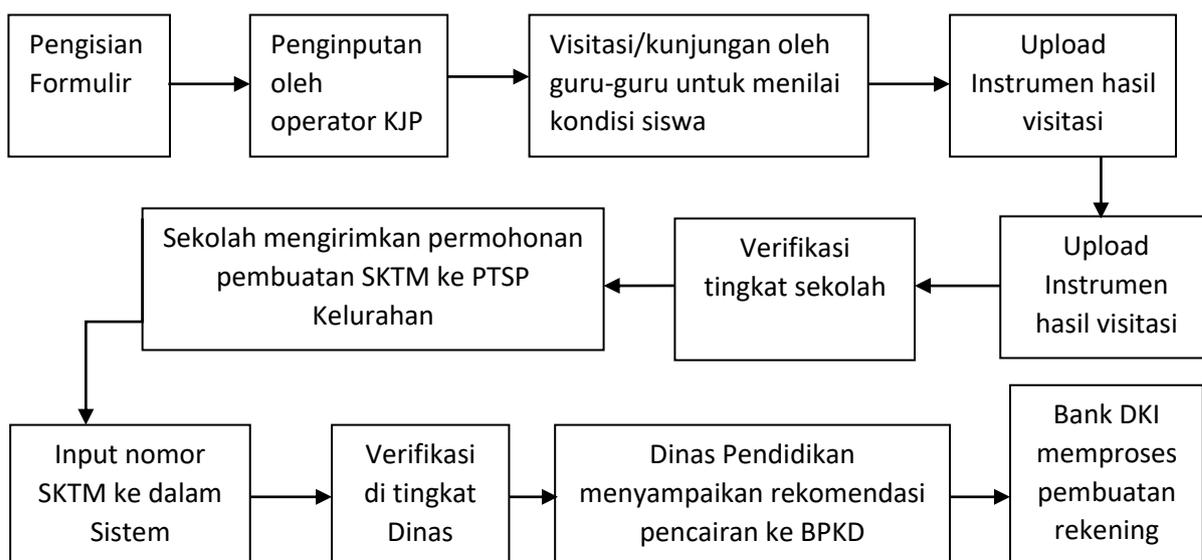
“KJP dapat terus berlanjut dikarenakan merupakan program pemerintah yang kini sudah mendarah daging, sehingga apabila nantinya berganti pemimpin maka

masyarakat awam akan mencari sosok pemimpin yang mengusung program KJP” (Ibu N, Penerima KJP Plus).

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu D, Operator KJP di SD Paseban Jakarta Pusat, “Menurut saya ini program yang semestinya bisa terus berlanjut setiap tahunnya, namun banyak hal –hal yang harus diperbaiki terutama dari teknis pendaftaran, kemudian pengajuan sampai dengan validasi dari setiap siswa yang mengajukan KJP, karena dari data yang tiap tahun dikumpulkan oleh operator di sekolah berupa formulir instrumen, kemudian data-data seperti SKTM, KK, KTP Akte serta Foto-foto yang menjelaskan kondisi mereka. Ini sangat membantu bagi anak-anak siswa menengah kebawah, mereka itu sangat terbantu sekali apalagi ketika mereka dihadapkan dengan ujian/ulangan, memang biaya sekolah sudah gratis, namun mereka dibebankan biaya lain diluar biaya pendidikan seperti untuk keperluan beli buku, alat tulis dan seragam yang diperlukan untuk menunjang pembelajaran baik disekolah maupun di rumah”.

“Sekolah menyebarkan formulir KJP. Orang tua mengisi dan yang paling banyak masalah yaitu saat pengumpulan data, formulir yang diisi cukup banyak kira-kira ada 9 halaman. Biasanya yang paling riskan ketika orang tua yang mengumpulkan ke sekolah dokumen tersebut dalam bentuk scan. Keterbatasan waktu input di sistem KJP, website yang sering down, proses upload yang lama dan file yang gagal tersimpan sehingga harus mengulang” lanjutnya.

Secara garis besar alur pengelolaan KJP Plus adalah sebagai berikut:



Sumber : Diolah dari hasil wawancara dengan informan

"Warga DKI Jakarta sangat antusias terhadap KJP ini. Hal ini terlihat pada saat pencairan, warga akan berbondong-bondong antri di ATM Bank DKI. Harapannya proses pendataan lebih disederhanakan kembali khususnya bagi siswa yang mengikuti program KJP lanjutan. Tidak perlu input dari ulang lagi, sekolah tinggal menyetujui saja dan verifikasi. Saya sangat berharap sekali dalam pendataannya melibatkan pihak-pihak lain. Infonya KJP ini akan diserahkan ke RT RW atau Dinas Sosial untuk pendataannya. Tentu saja hal ini sangat membantu sekali bagi para operator KJP yang sangat kewalahan pada saat pendaftaran KJP dibuka”. (Ibu D, Operator KJP).

## 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan program KJP Plus

Dari sekian banyak faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi dalam sebuah organisasi, faktor ekonomi, sumber daya (manusia maupun finansial), efek/dampak yang ditimbulkan serta dukungan eksternal menjadi faktor-faktor yang berperan

besar dalam keberlanjutan sebuah inovasi. Begitupun yang terjadi dengan program Kartu Jakarta Pintar ini, faktor-faktor yang dirasa memiliki pengaruh sangat besar yakni faktor sumber daya (manusia maupun finansial), efek/dampak yang ditimbulkan serta dukungan eksternal menjadi faktor yang sangat mempengaruhi program KJP ini.

a) Faktor Sumber Daya

Sumber daya dalam hal ini berkaitan dengan sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Sumber daya manusia berkaitan erat dengan kemauan orang-orang yang berada di dalam organisasi tersebut untuk melaksanakan kembali program KJP termasuk kemauan di level manager yang dalam kasus ini merupakan Kepala Daerah terpilih.

Dari segi anggaran, APBD DKI Jakarta sangat besar dibanding APBD daerah lain. Dari 87 Triliun APBD DKI sebanyak 3,9 Triliun dialokasikan untuk KJP Plus ini. Hal ini tentunya sangat mempengaruhi terhadap keberlanjutan program KJP karena didukung oleh anggaran yang besar.

b) Faktor Efek/Dampak yang ditimbulkan

Berkenaan dengan dampak dan manfaat program KJP Plus, program ini dinilai telah meningkatkan kesempatan dan peluang masyarakat miskin di Jakarta untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi dan memperbaiki taraf hidupnya. Selain itu program ini juga telah meningkatkan motivasi para siswa untuk terus bersekolah dan telah mendorong sebagian penerima program untuk meningkatkan prestasinya.

Bagi sekolah, program ini telah memberikan manfaat dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah dan jaminan keberlanjutan sekolah bagi siswa dari masyarakat tidak mampu dan pada akhirnya meningkatkan pula pemasukan bagi sekolah.

c) Faktor Dukungan Eksternal

Dukungan eksternal dalam hal ini merupakan dukungan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik pemenang pemilu juga turut berperan dalam keberlanjutan program KJP ini. Seperti yang diketahui bersama bahwa DPRD memiliki hak budgeting dalam perumusan APBD, dan bisa saja program tertentu diminimalkan bahkan di nol kan nilainya bila dirasa tidak bermanfaat. Program KJP ini karena sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tentunya menjadi pertimbangan tersendiri bagi DPRD untuk terus mempertahankan agar program ini terus berlanjut di periode-periode pemerintahan yang akan datang.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Program KJP merupakan program inovasi dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat khususnya dalam bidang pendidikan. Program ini memberikan akses seluas-luasnya kepada warga DKI Jakarta yang kurang mampu untuk menyekolahkan anak-anak mereka hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Program KJP Plus sejatinya bisa terus berlanjut karena beberapa faktor, antara lain faktor sumber daya (baik SDM maupun finansial/keuangan), adanya dukungan eksternal, dan dampak/efek yang ditimbulkan dari program KJP ini.

### **Rekomendasi**

Implementasi Kartu Jakarta Pintar di DKI Jakarta sejauh ini sudah cukup baik. Namun masih ada beberapa masukan yaitu dalam hal proses pengajuan dan pendaftaran ulang KJP dibuat lebih mudah bagi penerima KJP yang sudah mendapat KJP di tahun sebelumnya serta untuk pendataan sebaiknya dilakukan oleh pihak

eksternal dari luar sekolah yang lebih memahami tentang masyarakat itu sendiri, dalam hal ini adalah RT dan RW setempat.

Perlu penelitian lebih lanjut yang lebih komprehensif dengan menggunakan metode kuantitatif dan panduan kuesioner untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih maksimal dan dapat menggambarkan keterkaitan faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan program KJP di DKI Jakarta dan seberapa besar pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap keberlanjutan program KJP.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bertucci, Guido. 2005. *Innovations in the Public Sector Compendium of Best Practices: Winner of the United Nations Public Service Awards (2003 to 2005) (Unedited Version)*. Diakses pada 10 April 2020 dari <https://publicadministration.un.org/publications/content/PDFs/E-Library%20Archives/2005%20Innovations%20in%20the%20Public%20Sector%20Compendium%20of%20Best%20Practices.pdf>.
- Cankar, Stanka Setnikar., Petkovsek, Veronika. 2013. *Private and Public Sector Innovation and The Importance of Cross Sector Collaboration*. The Journal Of Applied Business Research – November/December 2013. Volume 29, Number 6.
- Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta. 2019. *Survei Evaluasi Program KJP Plus 2019*. Jakarta : Pusat Pelayanan Statistik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.
- Glor, Eleanor D. & Mario Rivera. 2015. *Proposal for Research on the Fate of Innovative Public Sector Organizations, Populations and Communities: A Research Synthesis and Prospectus*. The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal, 20(2): article 3. Collected April 10, 2020. at: <http://www.innovation.cc/volumes-issues/vol20-no2.htm>.
- Glor, Eleanor D. 2018. *Factors (Antecedents) Influencing Creation and Fate of Innovations and their Organizations – III*. The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal Volume 23(2), 2018, article 1. Collected April 10, 2020 at: <http://www.innovation.cc/all-issues.htm>.
- Glor, Eleanor D. 2019. *Factors and Factor Clusters Most Influential in Introduction and Global (Survive/Terminate) Fate of Innovations and their Organizations – IV*. The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal Volume 24(2), 2019, article 1. Collected April 10, 2020 at: <http://www.innovation.cc/all-issues.htm>.
- Kurteshi, Rinor. 2018. *Human Resources Supporting Innovation in the Public Sector : The Case of Kosovo*. Holistica Vol 9, Issue 3, 2018, pp. 145-172.
- M. Julnis Firmansyah. 2019. *Survei : KJP Anies Baswedan Lebih Memuaskan Ketimbang Era Ahok*. Diakses melalui <https://metro.tempo.co/read/1259701/survei-kjp-anies-baswedan-lebih-memuaskan-ketimbang-era-ahok> tanggal 10 Maret 2020.
- Nurdin, Ali. 2019. *Implementasi Dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) : Sebuah Analisis Kebijakan Pendidikan*. Al Amin : Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam Volume 2, No.1.

- Noor, Dani Vardiansyah., Fajarina. 2019. *Monitoring dan Evaluasi Kartu Jakarta Pintar (KJP) di Wilayah Jakarta Pusat*. Jurnal Abdimas Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Esa Unggul, Jakarta Vol 5 Nomor 4, Juni 2019.
- Silalahi. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Soebagyo, Joko. 2011. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suripto, Nadia Fakhrunnisa. 2014. *Evaluasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar Tingkat SMA/SMK Negeri di Jakarta Selatan*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Semarang.
- Siringoringo, Haryanto Pardamean., Hamiyati., Doriza Shinta. 2017. *Analisis Pengelolaan Kartu Jakarta Pintar dalam rangka Meningkatkan Hasil Belajar*. Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan (JKKP) Universitas Negeri Jakarta Vol.04 No.02.
- Ward, James D. 2017. *Leadership and Change in Public Sector Organizations: Beyond Reform*. Newyork: Routledge Taylor and Francis Group.